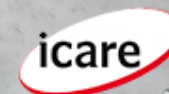


BIMTEK LEGAL DRAFTING

Andry Manuella Ginting, S.H., M.H. | Juli 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA





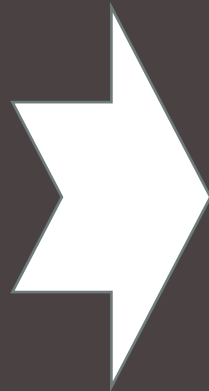
Pasal 98 (1) UU 12/2011
“Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.”

ANDRY MANUELLA GINTING
PERANCANG PERATURAN PUU AHLI MADYA
DITJEN PP – KEMENKUMHAM RI

SKENARIO WAKTU BIMTEK PUU II



OVERVIEW



Bimtek Legal Drafting MK APHTN-HAN
Kemenkumham

Perancang PUU

Pembentukan PUUan (UU 12/2011)

Teknik Penyusunan PUU II (Lampiran II)

5 Hal-Hal Khusus dalam *Drafting*

pendelegasian Kewenangan

perumusan norma Pendelegasian yang benar dan tepat

Penyidikan _Ketentuan Pidana

Pencabutan PUU (*included x mandiri*)

Perubahan PUU (urgensi x penggantian x Teknik penormaan)

Penetapan Perppu

Pengesahan Perjanjian Internasional (UU X Perpres)

Tips untuk Hal-Hal Khusus

Diskusikan...



TEKNIK PUU II



Pendelegasian
Kewenangan



Penyidikan



Pencabutan



Perubahan



Penetapan Perppu
&Pengesahan PI



e|gov
PASTI Nyata

icare

ALWAYS THE BEST

**REFORMASI
HUKUM**

PENDELEGASIAN KEWENANGAN



Pengaturan lebih lanjut ke PUU lain
(Jenis&hierarki)



Rumusan yang tegas, ruang lingkup materi delegasi dan jenis PUU nya



Penggabungan delegasi pengaturan



Pola penormaan yang tepat (delegasi, tidak delegasi blanko, bedakan dengan norma kewenangan)



Tidak mengulangi norma/rumusan dari PUU yang mendelegasikan, kecuali sebagai *aanlop*





PENYIDIKAN

- ◆ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (UU KUHAP)
- ◆ Penyidik Polri – Penyidik PNS (spesifikasi bidang ilmu)
- ◆ Ruang lingkup norma penyidikan paling sedikit terdiri ataspembentukan penyidik khusus, kewenangan dan tugas, koordinasi dengan penyidik Polri dan Penuntut Umum, pengangkatan sesuai PUU.

Pencabutan PUU yang lama dengan PUU baru (“penggantian”), pencabutan didalam ketentuan penutup

Pencabutan sebagian (pasal atau ayat) harus disebutkan tegas dalam PUU yang mencabut

PUU yang mencabut (lebih tinggi/setingkat)

Pencabutan mandiri (2 pasal), PUU dibuat khusus untuk mencabut

PUU yang telah dicabut tetap tidak berlaku meskipun PUU yang mencabut dikemudian hari telah dicabut pula.

“PENCABUTAN PUU”



PERUBAHAN PUU



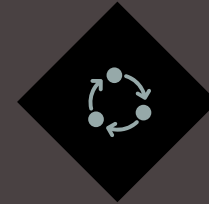
Menyisip,
menambah,
menghapus, atau
mengganti



Perubahan
terhadap
bab/bagian/para-
graph/pasal/
ayat, termasuk
frasa/kata/kalim-
at/angka



Perumusan
norma/kalimat
pembuka,
susunan dan tata
letak norma
perubahan harus
sesuai teknik



Perubahan
sistematika, lebih
dari 50%, atau
esensi,
direkomendasi
untuk mengganti



Terlalu sering
berubah,
disusun kembali
menjadi PUU
baru





PENETAPAN PERPPU & PENGESAHAN PI

- ◆ 2 Hal khusus tersebut mudah dalam teknik penyusunan, tetapi sulit dalam pembahasan substansi;
- ◆ Politik hukum & kepentingan nasional (*national interest*)
- ◆ Rancangan hanya meliputi 2 pasal yakni:
 - Untuk Perppu, pasal 1 penetapan Perppu menjadi UU dan pencantuman Lampiran serta Pasal 2 pemberlakuan
 - Untuk Pengesahan PI, pasal 1 pengesahan perjanjian dan pencantuman Lampiran serta Pasal 2 pemberlakuan



- Buat contoh rumusan norma delegasi/penyidikan/pencabutan/perubahan/pengesahan PI
- Bekerja dalam Tim
- Presentasikan & Diskusikan

TEAMWORK...



PRAKTIKUM TEKNIK PUU II



Tim 1
Pendelegasian
Kewenangan



Tim 2
Penyidikan



Tim 3
Pencabutan



Tim 4
Perubahan



Tim 5
Penetapan
Perppu
&Pengesahan
PI





TIPS

Merancang membutuhkan passion dan logika hukum, adaptif, komunikatif, dan bekerjasama

Kemampuan merumuskan, konsistensi, serta taat pada asas dan prinsip



e gov
PASTI Nyata



REFORMASI
HUKUM



“The greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation”

kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar adalah fondasi moral dan legislasi

- Jeremy Bentham -

THANK YOU



Instagram
[@nuellginting](#)



Twitter
[@nuellginting](#)



Email
andry.manuella@kemenkumham.go.id



Phone
082123554111

